

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan karunia rahmat taufiq dan hidayahNya sehingga Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas kinerja ini disusun menjadi suatu dokumen yang berisi tentang pencapaian kinerja Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR Tahun 2014.

Hasil laporan Akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan SAR Nasional baik di pusat maupun di daerah untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas kinerja ini sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik menuju keperintahanan yang baik atau good governance. Kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja di lingkungan Badan SAR Nasional.

Jakarta, Februari 2015

Direktur Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR

Suprayogi

Brigadir Jenderal TNI (MAR)

# LAMPIRAN

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Umum.....	1
2. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi.....	2
3. Struktur Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	4
4. Umum.....	4
5. Ikhtisar Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2014.....	5
A. Visi.....	5
B. Misi .....	5
C. Tujuan.....	5
D. Sasaran .....	5
E. Program .....	5
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014 .....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT BINA KETENAGAAN DAN PEMASYARAKATAN SAR .....	8
7. Umum.....	8
8. Prosedur Pengumpulan Data .....	9
9. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014.....	10
10. Analisis Capaian Kinerja.....	10
11. Aspek Keuangan .....	16
BAB IV PENUTUP.....	18

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan adanya Reformasi Birokrasi yang merupakan peraturan pemerintah berdasarkan PP 53 Tahun 2010 yang memuat disiplin pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan PP tersebut diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Dalam perbaikan Governance dan sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil berupa pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Permenpan No. 25 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR sebagai salah satu unit kerja di Badan SAR Nasional menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, bimbingan teknis, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan pelatihan serta pmasarakatan SAR untuk melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pmasarakatan SAR sesuai dengan KEP/101/1/2009 tentang uraian tugas di Organisasi Tata Laksana di Badan SAR Nasional.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan tahun 2014 yang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Umum**

Posisi Indonesia secara geografis berada diantara dua Benua dan dua Samudra sehingga menjadi pertemuan dan persimpangan arus pelayaran dan penerbangan antar negara. Oleh karenanya potensi terjadinya musibah di bidang penerbangan dan pelayaran tinggi. Selain itu, secara geologis Indonesia berada pada jalur api dan pertemuan dua lempeng bumi yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang rawan terjadinya bencana alam berupa gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.

Badan SAR Nasional dalam mengantisipasi hal tersebut terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang SAR baik internal Basarnas maupun untuk potensi SAR. Sesuai Undang-Undang No.29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan pertolongan serta Peraturan kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Badan SAR Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian Potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya.

Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR adalah unit kerja di Badan SAR Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan memasyarakatkan SAR.

Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah revisi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan diatas, Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan SAR Nasional Tahun Anggaran 2014.

## **2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **A. Kedudukan**

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional. Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Potensi SAR.

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pendidikan dan pelatihan SAR, penyiapan tenaga dan potensi SAR serta standarisasi, sertifikasi dan pemasarakatan SAR.

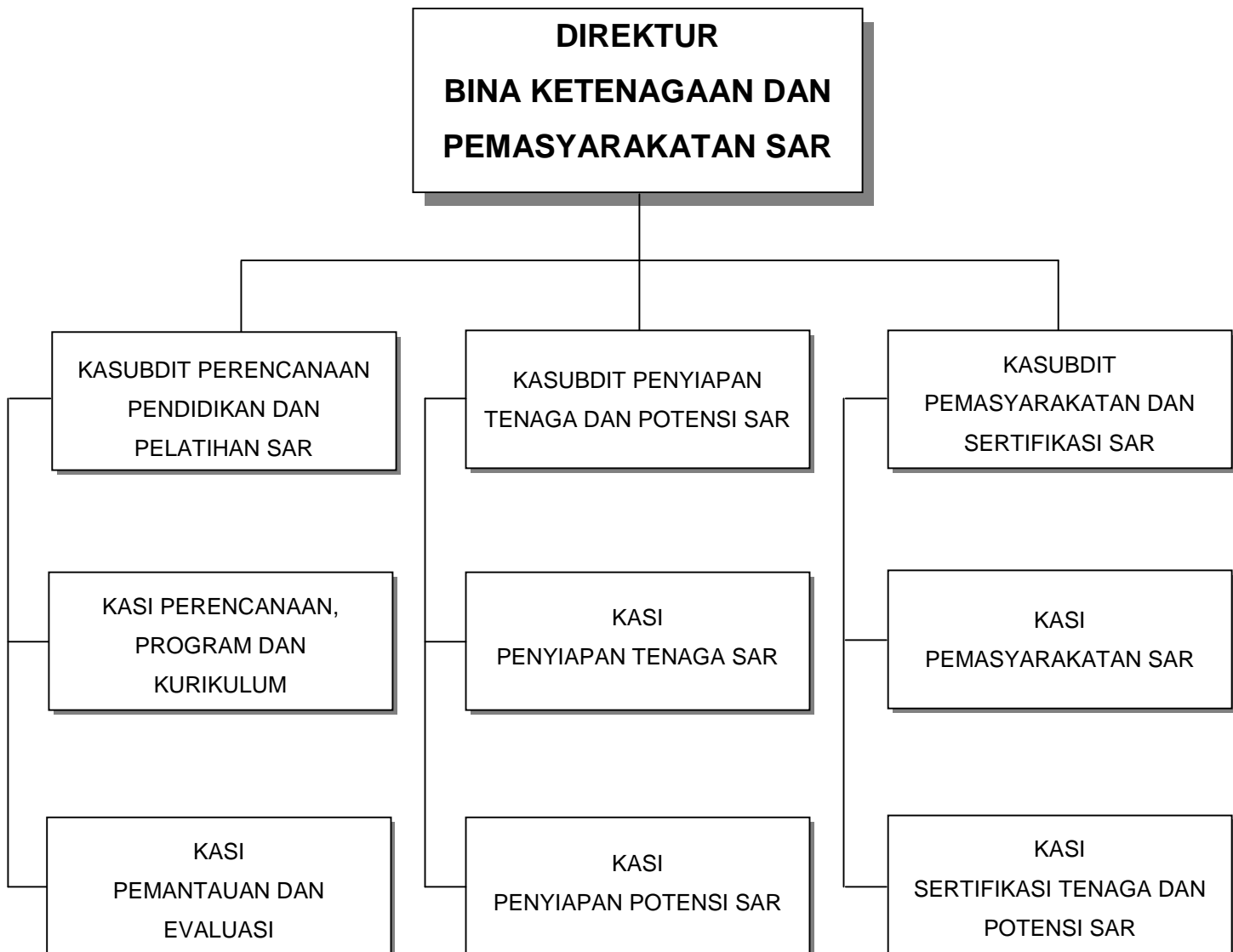
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan SAR, pembinaan tenaga dan potensi SAR serta standarisasi, sertifikasi dan pemasarakatan SAR;
- 2) penyusunan rencana dan program, kurikulum dan silabus serta pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan SAR;

- 3) penyusunan rencana dan program serta penyiapan tenaga dan potensi SAR;
- 4) penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan pemasyarakatan SAR;
- 5) penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan sertifikasi tenaga dan potensi SAR;
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### 3. Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA KETENAGAAN DAN PEMASYARAKATAN SAR



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **4. Umum**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 Basarnas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*) yang disebut SAR. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Basarnas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.

Dalam meningkatkan pelayanan SAR, Basarnas dituntut membuat suatu perencanaan yang mempunyai perspektif lebih panjang, karena berbagai masalah yang dihadapi saat ini baik yang menyangkut kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan, sistem SAR nasional, koordinasi dan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat memerlukan penanganan secara bertahap agar hasil yang dicapai bisa membawa nama Basarnas semakin baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam membuat suatu rencana kebijakan jangka panjang tersebut maka dibuatlah Rencana Strategis Basarnas 2010-2014 sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pengembangan kelembagaan Basarnas, hukum dan kewenangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, sarana prasarana, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama nasional dan internasional serta dalam rangka pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang terlaksana secara terpadu dengan program pembangunan nasional dan bersifat komprehensif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan serta berpegang kepada pendekatan yang sistemik.



## **5. Ikhtisar Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2014**

### **A. Visi**

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan kompeten untuk mendukung keberhasilan operasi SAR, melalui perumusan kebijakan pedoman dan prosedur serta pemasyarakatan SAR.

### **B. Misi**

- 1) Menyelenggarakan penyusunan program Diklat dan Pemasyarakatan SAR;
- 2) Menyelenggarakan penyiapan sarana dan prasarana Diklat SAR khususnya Puduklat Basarnas;
- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan sumber daya manusia di bidang SAR;
- 4) Melakukan pembinaan potensi SAR dan meningkatkan koordinasi dalam mensinergikan potensi SAR.

### **C. Tujuan**

Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang tersedia, sarana dan prasarana diklat yang memadai serta pemasyarakatan SAR guna mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi SAR.

### **D. Sasaran**

- 1) Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi/profesionalitas serta memasyarakatan SAR guna mendukung keberhasilan operasi SAR;
- 2) Terwujudnya sarana dan prasarana diklat guna mendukung keberhasilan operasi SAR.

### **E. Program**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktur Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR mempunyai program utama yang akan dilaksanakan, yaitu :

**“Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan”**  
 Program ini bertujuan pada pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana SAR serta pembinaan pengawakan, terselenggaranya diklat SAR, pengelolaan operasi dan Latihan SAR, dan terlaksananya pengelolaan sistem peralatan komunikasi SAR.

## 6. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam penetapan. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Direktur Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR disusun dengan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Indikator Kinerja Utama :</b>			
Prosentase SDM SAR yang profesional serta partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan operasi SAR			
Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi/	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Diklat SAR Basarnas</b>		
	- Penyusunan Pedoman Sertifikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	1 Dokumen	250.000.000
	- Penyusunan Bahan Ajar dan Kurikulum Silabus Diklat Teknis SAR	1 Dokumen	250.000.000

profesionalitas serta memasyarakatkan SAR guna mendukung keberhasilan operasi SAR	<b>Jumlah Dokumen Penyiapan Tenaga dan Potensi SAR</b>		
	- Jumlah Dokumen Pembinaan Potensi SAR	33 Dokumen	450.000.000
	- Jumlah Peserta Pembinaan Basarnas Special Group (BSG)	52 Orang	3.500.000.000
	<b>Jumlah Dokumen Pemasyarakatan dan Sertifikasi SAR Basarnas</b>		
	- Jumlah Dokumen Forum Koordinasi SAR Daerah	4 Dokumen	1.250.000.000
	- Jumlah Dokumen Pemasyarakatan SAR, Sosialisasi dan Penyuluhan	4 Dokumen	750.000.000
	- Jumlah Dokumen Penerbitan dan Percetakan Buku SAR Goes To School	1 Paket	2.000.000.000
- Jumlah Dokumen Program SAR Goes To School di 5 Daerah Rawan Bencana	5 Dokumen	1.000.000.000	
<b>Indikator Kinerja Utama :</b>			
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Diklat guna mendukung keberhasilan operasi SAR			
Terwujudnya sarana dan prasarana diklat guna mendukung keberhasilan operasi SAR	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Diklat Basarnas</b>		
	- Pembangunan Gedung Diklat*	1 Paket	20.457.000.000

Keterangan :

- \*) Pembangunan gedung diklat tidak dilaksanakan oleh Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT BINA KETENAGAAN**  
**DAN PEMASYARAKATAN SAR**

**7. Umum**

Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada hasil akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil-hasil yang diperoleh. Hasil-hasil yang diperoleh tersebut kinerjanya harus diukur sampai sejauh mana pencapaiannya melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR.

Dalam penilaian pencapaian kinerja Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR dilakukan pengelompokan kategori, yaitu :

**Penilaian Pencapaian Kinerja**

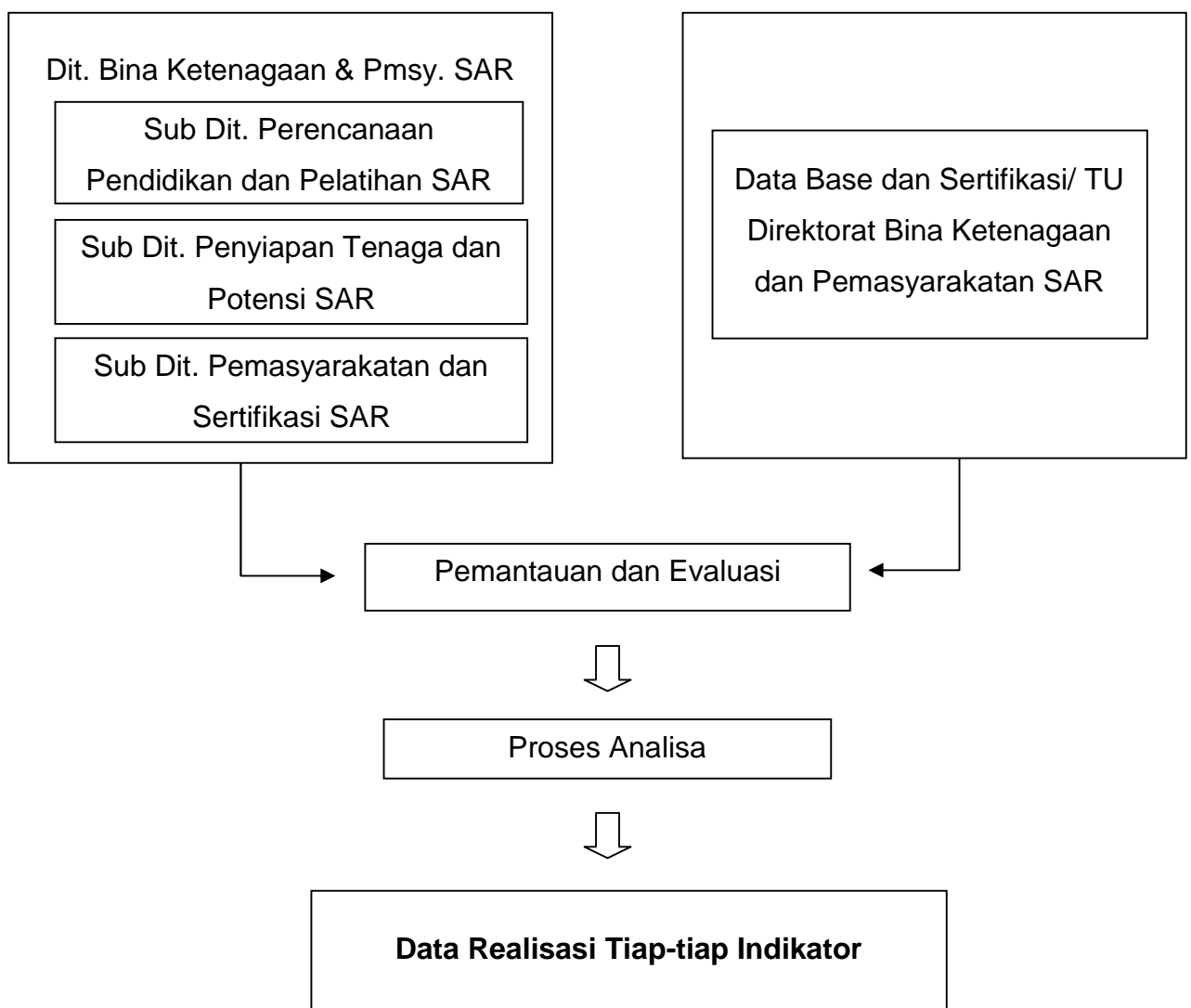
No.	Kategori	Nilai Angka (%)	Interprestasi
1.	A	86 – 100	Sangat Baik
2.	B	66 – 85	Baik
3.	C	51 – 65	Cukup
4.	D	0 – 50	Kurang

Secara garis besar capaian kinerja Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR dapat dikatakan sangat baik dengan kategori A dan sudah

memenuhi target capaian kinerja, yaitu dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100%.

## 8. Prosedur Pengumpulan Data

Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target (rencana) dan Realisasi dari tiap-tiap indikator. Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari seluruh Sub Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR, baik data administratif maupun data teknis. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Adapun prosedur pengumpulan data tersebut sebagaimana pada gambar berikut :



## 9. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR telah mencapai prosentase nilai capaian kinerja yang cukup baik. Hasil evaluasi kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (IKU).

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Direktorat Bina Ketenagaan & Pemsy. SAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KINERJA
Prosentase SDM SAR yang profesional serta partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan operasi SAR	100 %	101,8 %	100 %

Indikator tersebut didukung oleh 1 (satu) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja. Sasaran tersebut antara lain adalah : terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi/ profesionalitas serta memasyarakatkan SAR guna mendukung keberhasilan operasi SAR.

## 10. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan 2 (dua) sasaran yang menjadi fokus kegiatan Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR Tahun Anggaran 2013, pengukuran pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2 Indikator Sasaran terlaksana kegiatan Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR.

A. Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi/ profesionalitas serta memasyarakatkan SAR guna mendukung keberhasilan operasi SAR

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	2013			2014		
<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Diklat SAR Basarnas</b>						
Jumlah dokumen Bahan-bahan Pengajaran Diklat SAR	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
Jumlah dokumen Kurikulum dan Silabus	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
<b>Jumlah Penyelenggaraan Diklat SAR Basarnas/Penyiapan Tenaga dan Potensi SAR</b>						
Jumlah dokumen pembinaan potensi SAR	-	-	-	33 dok	33 dok	100
Jumlah Peserta Pembinaan Basarnas Special Group (BSG)	-	-	-	52 orang	60 orang	115
Jumlah kelulusan peserta Pelatihan Jungle Rescue	30 orang	36 orang	120	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat SAR Planning	30 orang	24 orang	80	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat Bintek Peningkat kapasitas	52 orang	52 orang	100	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat HART	43 orang	43 orang	100	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat Water Rescue	38 orang	38 orang	100	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat BSG II	90 orang	87 orang	97	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat para dasar BSG II	80 orang	80 orang	100	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat MFR	30 orang	31 orang	103	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat Free fall BSG II	11 orang	11 orang	100	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat Instruktur SAR	30 orang	30 orang	100	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat Training Crew Heli	20 orang	20 orang	100	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat Amurang Potensi	55 orang	55 orang	100	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat Potensi Jungle SAR Gunung Gede	100 orang	100 orang	100	-	-	-

Jumlah kelulusan peserta Diklat Potensi Water Rescue Yogyakarta	50 orang	50 orang	100	-	-	-
Jumlah kelulusan peserta Diklat Potensi jungle Rescue Mapala Unsur SAR	37 orang	37 orang	100	-	-	-
<b>Jumlah dokumen Pemasarakatan dan Sertifikasi SAR Basarnas</b>						
Jumlah dokumen SAR Goes to School	4 dok	4 dok	100	5 dok	5 dok	100
Jumlah penerbitan, percetakan buku SAR Goes to School	1 dok	1 dok	100	1 Paket	1 Paket	100
Jumlah dokumen Forum Koordinasi SAR Daerah (FKSD)	4 dok	4 dok	100	4 dok	4 dok	100
Jumlah dokumen Pemasarakatan SAR, Sosialisasi dan Penyuluhan	-	-	-	4 dok	4 dok	100

Dari tabel diatas dapat dilihat, target kinerja yang ditetapkan digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran dipenuhi dengan tingkat masing-masing indikator yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jumlah dokumen pengelolaan rencana diklat yang telah tersusun ada 2 (dua). Dokumen ini berupa draft Peraturan Kabasarnas tentang Kursil Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Rescuer Badan SAR Nasional dan merevisi Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional. Selain itu juga menghasilkan 1 (satu) buah dokumen dari kegiatan revisi penyusunan bahan ajar diklat teknis Medical First Responder (MFR) dan Pertolongan di Air (Water Rescue). Diharapkan bahan ajar diklat bagi potensi SAR yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelatihan bagi potensi SAR di seluruh Indonesia.





FOTO	URAIAN
	<p>Kegiatan Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Jabatan Fungsional Rescuer berlangsung dua kali, pertama di Swissbel Hotel (26-27 Juni 2014) dan di PP University Hotel (17-19 Juli 2014)</p>
	<p>Kegiatan revisi penyusunan bahan ajar diklat teknis Medical First Responder (MFR) dan pertolongan di Air (Water Rescue) berlangsung di Green Sentul Indah Hotel &amp; Resort (28-30 Nopember 2014)</p>

2) Jumlah dokumen pembinaan potensi SAR sebanyak 33 Dokumen. Semua diklat internal yang Balai Diklat Basarnas dan Kantor SAR laksanakan wajib didampingi oleh Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian kurikulum dan silabus yang telah dibuat oleh Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR. Jenis diklat yang telah dilaksanakan Balai Diklat tahun 2014 meliputi Diklat SAR Tingkat Dasar dan Standarisasi Diklat SAR Tingkat Dasar: *Diklat lanjutan meliputi Jungle Rescue, Medical First Responder, Water Rescue, High Angle rescue Technique, Helly Rescue* dan Tingkat Spesialis SAR *Planning* (2 kali). Selain itu, diklat internal Tingkat lanjutan juga dilaksanakan oleh beberapa Kantor SAR di masing-masing region, yaitu Diklat HART oleh Kantor SAR Medan, Diklat SAR Planning oleh Kantor SAR Manado dan Kantor SAR Ambon, Diklat MFR oleh Kantor SAR Jayapura dan Diklat Jungle Rescue oleh Kantor SAR Surabaya.

FOTO	URAIAN
	<p>Kegiatan Diklat SAR Tingkat Lanjutan telah dilaksanakan secara berkesinambungan, salah satunya ialah Diklat Jungle Rescue yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pertolongan di Gunung dan Hutan.</p>
	<p>Kegiatan Diklat SAR Tingkat Dasar mengaplikasikan tehnik high Angle Rescue Technique (HART) di Tebing Kelapa Nunggal</p>

3) Kegiatan SAR Goes To School bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar SAR tentang musibah/bencana dan gempa bumi kepada siswa-siswi tingkat SD, SMP, dan SMA dari berbagai sekolah dengan memberikan materi pembelajaran atau penyuluhan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing yang terdapat dalam buku panduan SAR Goes To School yang dibagikan kepada seluruh peserta. Kegiatan berlangsung 5 (lima) kali, yaitu di Kantor SAR Gorontalo (20 Maret 2014), Kantor SAR Mataram (29 Oktober 2014), Pos SAR Amurang (5-11 Mei 2014), Pelabuhan Indah Kiat Banten (3-5 Maret 2014) dan Kunjungan anak sekolah ke Kantor Pusat Basarnas sekaligus SAR Goes To School (April 2014).

FOTO	URAIAN
	<p>Kegiatan SAR Goes To School di Kantor SAR Gorontalo, pemutaran film mengenai profil Basarnas.</p>
	<p>Kegiatan SAR Goes To School di Kantor SAR Mataram, para siswa-siswi dijelaskan materi Medical First Responder.</p>

- 4) Jumlah dokumen Rapat Forum Koordinasi SAR Daerah (FKSD) yang telah dikembangkan menjadi Rapat Forum Koordinasi Potensi SAR Daerah (FKPSD) berjumlah 4 (empat) dokumen. Kegiatan ini berlangsung di Gorontalo tanggal 18-19 Maret 2014, Bandung tanggal 8-9 September 2014, Amurang tanggal 16-17 Oktober 2014, dan Mataram tanggal 28-29 Oktober 2014. Selain itu program pemasyarakatan SAR yang dilaksanakan berupa pameran peralatan SAR yang dimiliki Kantor SAR dan dijelaskan kegunaan-kegunaannya di lapangan. Pameran ini dilaksanakan bersamaan tempat dan waktunya dengan kegiatan FKPSD.

FOTO	URAIAN
	<p>Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Potensi SAR Daerah (FKPSD) di Bandung dibuka langsung oleh Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI FHB Sulistyo.</p>
	<p>Kegiatan Pameran Peralatan SAR di Gorontalo bersamaan dengan Rapat Forum Koordinasi SAR Daerah.</p>

## 11. Aspek Keuangan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR, pada tahun Anggaran 2014 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total anggaran yang semula Rp.9.450.000.000,- menjadi Rp.7.950.000.000 dikarenakan Pagu Anggaran untuk Penerbitan dan Percetakan Buku SAR Goes To School mengalami efisiensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- Sedangkan prosentase realisasi anggaran yang dicapai pada tahun 2014 adalah sebesar 88%, sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2013 mencapai 98%. Hal tersebut secara keseluruhan menggambarkan daya serap anggaran telah tercapai untuk Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran

INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	2013			2014		
Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Diklat SAR Basarnas	852.574.000	805.477.400	94	500.000.000	367.402.000	73,5
Jumlah Penyelenggaraan Diklat SAR Basarnas/ Penyiapan Tenaga dan Potensi SAR	7.878.379.600	7.878.379.600	100	3.950.000.000	3.450.000.000	87,3
Jumlah dokumen Pemasyarakatan dan Sertifikasi SAR	2.973.670.000	2.939.712.500	99	3.500.000.000*	3.141.945.100	89,8

\*) Adanya efisiensi Pagu Anggaran Penerbitan, Percetakan Buku SAR Goes To School sebesar Rp.1.500.000.000,- dari pagu awal Rp.2.000.000.000,- menjadi Rp.500.000.000,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan SAR Nasional khususnya unit kerja Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR tahun 2014 ini merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan yang memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR. Dari hasil evaluasi kinerja secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2013 realisasi rata-rata sasaran Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR sebesar 100 %, hal tersebut menggambarkan capaian target secara keseluruhan dengan hasil yang sangat baik.

Adapun permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

- Waktu pelaksanaan pelatihan potensi SAR tiap Kantor SAR menumpuk di akhir tahun, upaya yang dilakukan dengan manajemen pelaksanaan pelatihan agar disusun dan dikordinasikan dengan Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR.
- Keseragaman pembuatan RGB tiap Kantor SAR belum semua sesuai dengan kondisi rawan musibah di wilayahnya dan potensi SAR yang ada, upaya yang dilakukan adalah memiliki peta kondisi rawan musibah kemudian menentukan personil dari potensi SAR berkualitas yang ada untuk diikutsertakan dalam program pembinaan dalam bentuk pelatihan.
- Target pemasyarakatan SAR belum mencapai sasaran yang diinginkan, upaya yang dilakukan dengan membuat terobosan dan ide yang progresif.

Tersusunnya laporan akuntabilitas ini disadari belum sempurna, untuk mewujudkan pencapaian dan peningkatan kinerja Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR akan melakukan penyempurnaan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mencapai hasil yang maksimal.

LAKIP Tahun 2014 yang telah tersusun ini diharapkan dapat memperlihatkan pelaksanaan kinerjanya dan mendorong adanya peningkatan kinerja yang dapat diimplementasikan pada program kerja berikutnya.